



Kementerian Koordinator Bidang
Maritim dan Investasi

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020



Délima
Deputi Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke pada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat, bimbingan, dan karunia-Nya, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat menyelesaikan program dan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan ini merupakan hasil capaian target dan realisasi pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Tahun 2020. Laporan ini merupakan salah satu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan disusun sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari Sekretariat Deputi dan 5 Asisten Deputi, yaitu; Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Asisten Deputi Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak terlepas dari bantuan pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan kinerja ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih ada kekurangan. Oleh sebab itu, diharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2021
Deputi Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Odo R.M. Manuhutu



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perencanaan Kinerja ini disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam mencapai tujuannya, seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Marves telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur dengan indikator kinerja (IK) yang dirinci sesuai target sesuai waktu yang ditetapkan. Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020, unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS), yang dijabarkan dalam 15 (lima belas) indikator kinerja (IK).

Selama tahun 2020 nilai capaian kinerja unit Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **100,2%** Nilai tersebut didapat melalui akumulasi nilai tiap perspektif yang ada. Adapun penjelasan singkat mengenai pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Data Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Stakeholder Perspective					
SS.1	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Nasional	Nilai Devisa Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	USD 3 Milyar	USD 86,4 Milyar	100%
		% Kontribusi PDB Pariwisata	3%	2.55%	83%
SS.2	Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional Sesuai Target	Jumlah Tata kelola Destinasi Pariwisata	5 Destinasi	5 Destinasi	100%
SS.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang Terdidik dan Terlatih	50.000 Orang	505.677 Orang	100%
Costumer Perspective					



SS.4	Terwujudnya Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah tata Kelola Pariwisata	5 Tata Kelola	5 Tata Kelola	100%
SS.5	Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pusat unggulan Ekonomi Kreatif	4 Lokasi	6 Lokasi	100 %
SS.6	Tingkat Ketersediaan Permodalan Industri Pariwisata dan Industri Kreatif	Nilai Penanaman Modal Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 17 Triliun	Rp. 31,07 Trilyun	120%
SS.7	Terwujudnya Perlindungan dan Nilai Keekonomian atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk/Jasa yang Difasilitasi Mendaftar Kekayaan Intelektual	75 Produk/Jasa	1250 Produk/Jasa	100%
SS.8	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000 Orang	505.677 Orang	100%
Internal Business Perspective					
SS.9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	% Rancangan Kebijakan yang Diterbitkan	50%	100%	100%
		% Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Dilaksanakan	50%	100%	100%
Learning and Growth Perspective					
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentasi SDM Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Sesuai Kompetensi	60%	97%	100%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60	64.51	100%
		Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50	91,25	100%
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60	88,7	100%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	viii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	x
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
1.2.1 Kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2
1.2.2 Tugas Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	2
1.2.3 Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2
1.3 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..	3
1.4 Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7
1.5 Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7
1.6 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8
BAB II – RENCANA KERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.1.1 Visi.....	10
2.1.2 Misi	10
2.1.3 Tujuan	11
2.1.4 Sasaran Strategis	11
2.2 Rencana Kinerja	12
2.3 Pengukuran Kinerja	14
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Capaian Kinerja	15
3.1.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Nasional.....	17



3.1.2	Sasaran Strategis Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional Sesuai Target	19
3.1.3	Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	22
3.1.4	Sasaran Strategis Terwujudnya Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	23
3.1.5	Sasaran Strategis Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif.....	24
3.1.6	Sasaran Strategis Tingkat Ketersediaan Permodalan Industri Pariwisata dan Industri Kreatif.....	25
3.1.7	Sasaran Strategis Terwujudnya Perlindungan dan Nilai Keekonomian atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	26
3.1.8	Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	28
3.1.9	Sasaran Strategis Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien.....	28
3.1.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	30
3.1.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	31
3.1.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33
3.2	Realisasi Anggaran	33
3.2.1	Realisasi Anggaran Sekretariat Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	34
3.2.2	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pariwisata Berkelanjutan	35
3.2.3	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif	36
3.2.4	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	37
3.2.5	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	38
3.2.6	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	39
BAB IV - PENUTUP		41
BAB V - LAMPIRAN.....		45
5.1	Lampiran Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	45
5.2	Lampiran Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan SIK-M berbasis <i>Balance Scorecard</i>	48
5.3	Lampiran Pagu dan Realisasi Anggaran Desember 2020	49



5.4	Kertas Kerja Bahan Kebijakan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif”	53
5.5	Ringkasan Kebijakan Sasaran Strategis “Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien”	53
5.6	Kertas Kerja Kebijakan Sasaran Strategis “Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien” (IKPA)	54
5.7	Kertas Kerja Kebijakan Sasaran Strategis “Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif” (SAKIP dan PMPRB)	54
5.8	Kertas Kerja Kebijakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	55
5.9	Laporan Strategi Pemasaran Bagi Pelaku UMKM	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3
Gambar 3. Peta Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12
Gambar 4. Struktur PDB Menurut Usaha (Persen)	18
Gambar 5. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Klasifikasi Bintang.....	19
Gambar 6. Hasil Kunjungan Tim Deputi V ke Kawasan Danau Toba	20
Gambar 7. Penataan Kawasan Waringin.....	21
Gambar 8. Penataan Kampung Wisata	22
Gambar 9. Kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus Likupang	22
Gambar 10. Hasil Kunjungan Lapangan ke Tana Mori	23
Gambar 11. Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Kopi Arabika Toba	27
Gambar 12. Rapat Koordinasi Percepatan dengan Dirjen Kekayaan Intelektual KemenkumHAM.....	27
Gambar 13. Area Perubahan Reformasi Birokrasi.....	32
Gambar 14. Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan SIK-M Berbasis <i>Balance Scorecard</i>	43



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Daftar Tabel

Tabel 1. Rincian Data Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020.....	ii
Tabel 2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3
Tabel 3. Isu-Isu Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif8	
Tabel 4. Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020.....	13
Tabel 5. Penilaian Status Kinerja.....	14
Tabel 6. Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15
Tabel 7. Realisasi Penanaman Modal Pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25
Tabel 8. Nilai Assesment Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	30
Tabel 9. Nama Operator dan Para Assesor	32
Tabel 10. Realisasi Anggaran Esselon II Deputy Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Per Desember 2020	33
Tabel 11. Anggaran Sekretariat Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	35
Tabel 12. Anggaran Asisten Deputy Bidang Pariwisata Berkelanjutan	35
Tabel 13. Anggaran Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif	36
Tabel 14. Anggaran Asisten Deputy Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..	37
Tabel 15. Anggaran Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif	38
Tabel 16. Anggaran Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif	39
Tabel 17. Capaian Kinerja Unit Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	41
Tabel 18. Realisasi Anggaran Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	43



Daftar Grafik

Grafik 1. Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7
Grafik 2. Hasil Assesment Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	31
Grafik 3. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	34
Grafik 4. Realisasi Anggaran Sekretariat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..	35
Grafik 5. Realisasi Anggaran Asisten Deputy Pariwisata Berkelanjutan	36
Grafik 6. Realisasi Anggaran Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif	37
Grafik 7. Realisasi Anggaran Asisten Deputy Pemodan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	38
Grafik 8. Realisasi Anggaran Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	39
Grafik 9. Anggaran Asisten Deputy Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	40



DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Asdep	: Asisten Deputi
Asdep 1	: Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Asdep 2	: Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Asdep 3	: Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Asdep 4	: Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Asdep 5	: Asisten Deputi Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
IK	: Indikator Kinerja
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKU	: Indikator Kinerja Utama
PDB	: Produk Domestik Bruto
PMPRB	: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja
SS	: Sasaran Strategis
TA	: Tahun Anggaran



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Bidang Kematriman.

Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri Sekretariat Deputy dan 5 Asisten Deputy, yaitu; Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Asisten Deputy Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan capaian kinerja atas target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam mendukung peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

1.2 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

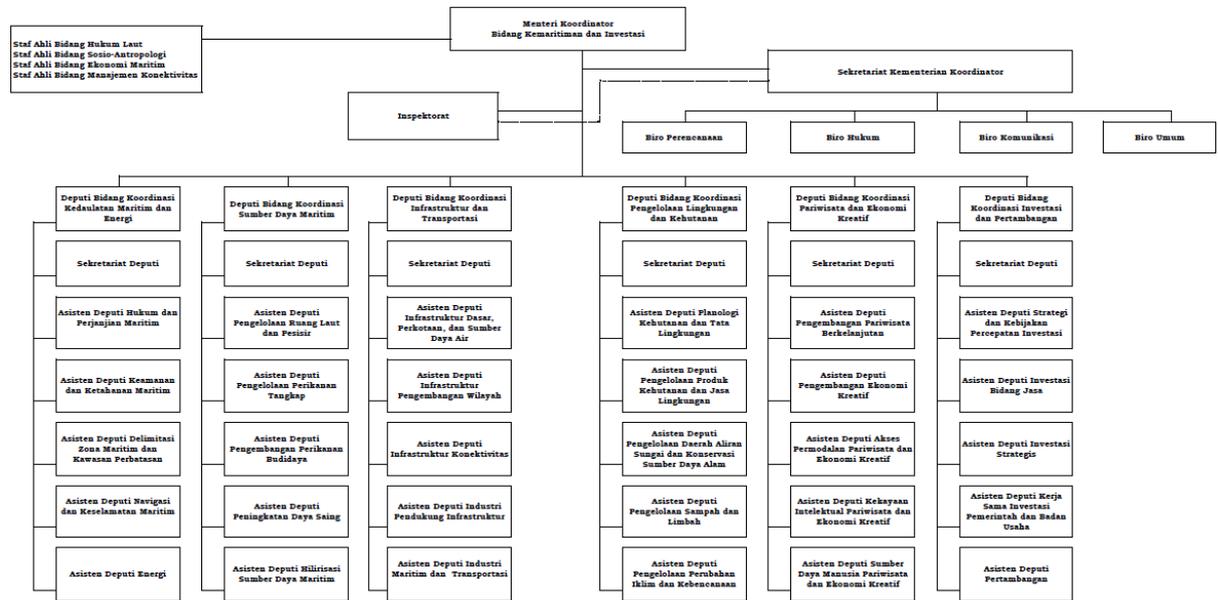
Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, Maka Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kedudukan, Tugas, dan Fungsi sebagai berikut :



1.2.1 Kedudukan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Deputy dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.

Gambar 1. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



1.2.2 Tugas Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tugas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

1.2.3 Fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat menyelenggarakan fungsi :

- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

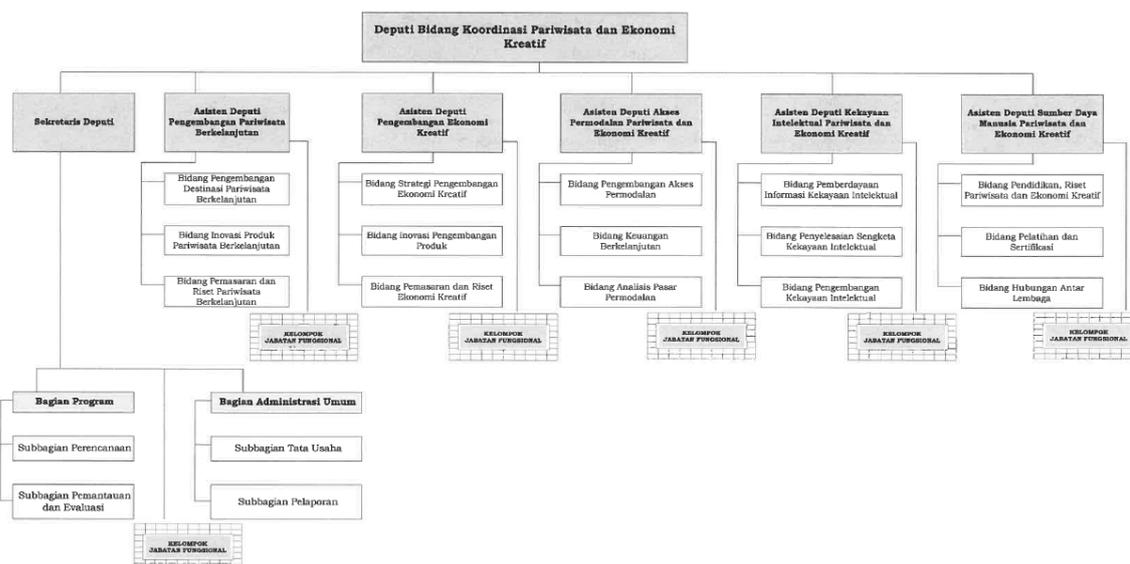


1.3 Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didukung oleh 6 (enam) unit Eselon II yang terdiri dari Sekretariat Deputy dan 5 (lima) Asisten Deputy.

Berikut penjelasan struktur organisasi serta tugas dan fungsi dari masing masing unit kerja yang ada di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

Gambar 2. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Tabel 2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Unit Kerja	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputy	melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja; c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi; d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan,



		<p>dan keuangan; e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara; f. koordinasi penyusunan laporan; dan g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.</p>
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	<p>melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pariwisata berkelanjutan.</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.</p>



Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif	<p>melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi kreatif.</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif.</p>
Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang akses permodalan pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan.</p>



<p>Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual.</p>
<p>Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis,</p>

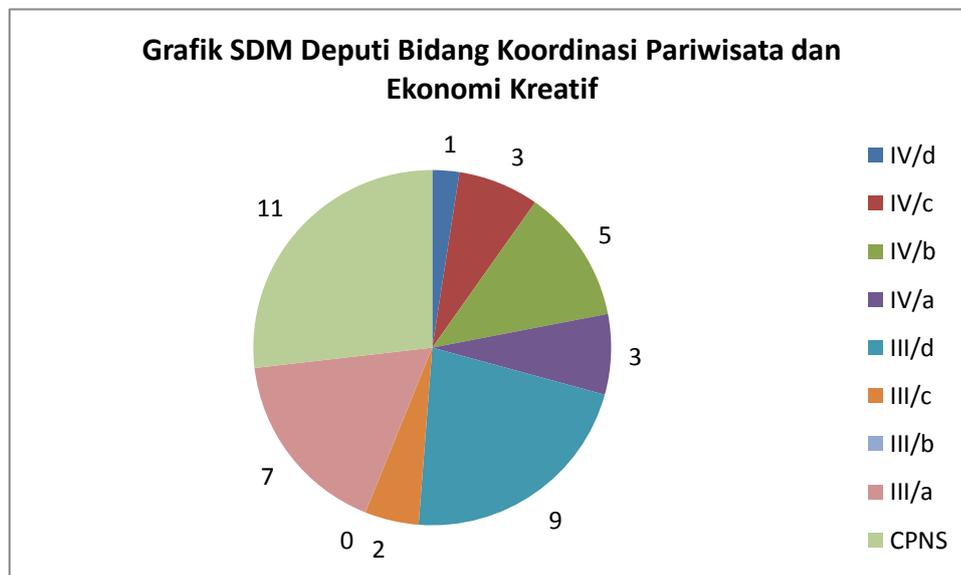


evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.

1.4 Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada Tahun Anggaran 2020, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas fungsi dengan 35 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 11 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 14 Tenaga Kerja Kontrak. PNS dan CPNS pada Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim memiliki keragaman golongan/ruang yang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1. Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



1.5 Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah disesuaikan berdasarkan isu-isu strategis yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Indonesia. Berikut adalah isu-isu strategis dan tugas tambahan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :



Tabel 3. Isu-Isu Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Issue	K/L Terkait	Unit Kerja
1	Destinasi Pariwisata	Kemendparekraf, Kemendhub, PUPR	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Pembangunan Marina, Cruise, dan Yacht	Kemendparekraf, PUPR, Kemendhub	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Transformasi digital UMKM dan IKM	18 KL	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Pengembangan Pusat Unggulan Kreatif	Kemendparekraf, KemendBUMN, KemendPUPR, LKPP, idEA	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Strategi Pengembangan Kuliner	Kemenddag, Kemendparekraf, KemendBUMN, LIPI, Kemendkeu, Kemlu, BPOM	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Medical Tourism	Kemendkes, Kemendparekraf, KemendATR, BKPM	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020, sistematika pelaporannya dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020

b. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan hal-hal umum terkait Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 dan juga uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LAKIP.

c. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



Pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai program, sasaran dan kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020, rencana kerja dan anggaran tahun 2020, penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pengukuran/pengelolaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama Anggaran 2020 (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran.

e. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan terkait capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 untuk setiap indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan. Disajikan juga rekomendasi perbaikan untuk mencapai target kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.



BAB II RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis pada prinsipnya merencanakan kondisi akhir (visi, tujuan dan sasaran) dan cara mencapai kondisi akhir (misi, strategi dan program) serta indikator keberhasilannya.

2.1.1 Visi

Visi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejalan dengan Visi yang ditetapkan Kementerian Koordinator Bidang KEMARITIMAN DAN INVESTASI yaitu **Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang KEMARITIMAN DAN INVESTASI berkontribusi langsung pada ke-1, 2, 3, 4, 5 dari 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang harus dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Sejalan dengan Misi tersebut diatas, untuk mendukung pencapaian misi kementerian Koordinator Bidang KEMARITIMAN DAN INVESTASI yang sama dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020--2024, Deputy Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkontribusi langsung pada Misi ke-1, ke-2 dan ke-3 yaitu:

1. Misi ke-1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Misi ke-3 yaitu Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Ketiga (3) Misi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



2.1.3 Tujuan

Untuk mencapai sasaran pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 yaitu **“Memperkuatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara”** maka tujuan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional
2. Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.1.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diatas, maka sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu diarahkan untuk:

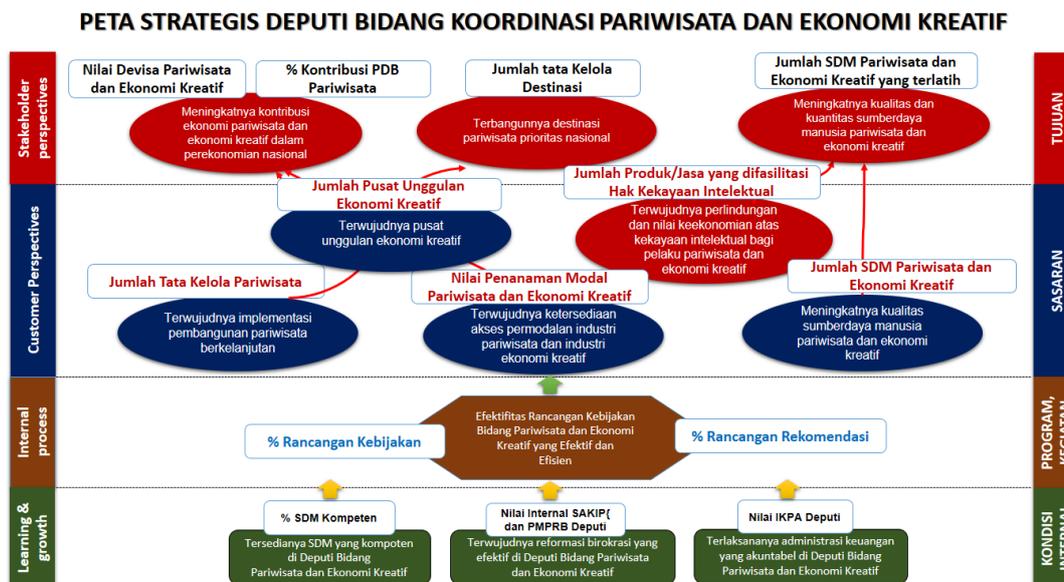
1. Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan
2. Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif
3. Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif
4. Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dengan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah membuat peta strategi.

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan melalui 3 (tiga) sasaran strategis utama yakni: 1) Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional, 2) Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional; 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.



Gambar 3. Peta Strategi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



2.2 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2020. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diwujudkan dari sasaran program dengan keluaran yang berbentuk outcome.

Perencanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan pendekatan *Balance Score Card* (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3. Peta strategis Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi sasaran strategis ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective) menggambarkan pencapaian tujuan;
2. perspektif pengguna (customer perspective) menggambarkan pencapaian sasaran strategis
3. perspektif proses bisnis internal (internal bussines process perspective) menggambarkan pencapaian kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran; dan
4. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective) menggambarkan pencapaian penguatan sumberdaya dan aspek penunjang tugas lainnya.

Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4. Sasaran Strategis Deputi idang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target Tahunan
Stakeholder Perspective			
SS.1	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Nasional	Nilai Devisa Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	USD 3 Milyar
		% Kontribusi PDB Pariwisata	3%
SS.2	Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional Sesuai Target	Jumlah Tata kelola Destinasi Pariwisata	5 Destinasi
SS.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang Terdidik dan Terlatih	50.000 Orang
Costumer Perspective			
SS.4	Terwujudnya Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah tata Kelola Pariwisata	5 Tata Kelola
SS.5	Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pusat unggulan Ekonomi Kreatif	4 Lokasi
SS.6	Tingkat Ketersediaan Permodalan Industri Pariwisata dan Industri Kreatif	Nilai Penanaman Modal Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 17 Triliun
SS.7	Terwujudnya Perlindungan dan Nilai Keekonomian atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk/Jasa yang Difasilitasi Mendaftar Kekayaan Intelektual	75 Produk/Jasa
SS.8	Menigkatnya Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000 Orang
Internal Business Perspective			
SS.9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	% Rancangan Kebijakan yang Diterbitkan	50%
		% Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Dilaksanakan	50%
Learning and Growth Perspective			
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentasi SDM Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Sesuai Kompetensi	60%



SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60
		Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60

2.3 Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2020 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Formula penghitungan Nilai Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} 100\%$$

Adapun Status Kinerja ditandai dengan warna dimana warna tersebut mencerminkan Nilai Kinerja sebagai berikut:

Tabel 5. Penilaian Status Kinerja

Biru	Hijau	Kuning	Merah
101 ≤ X ≤	81 ≤ X ≤	61 ≤ X ≤	0 ≤ X ≤
Melampaui Kriteria (MLK)	Memenuhi Kriteria (MK)	Belum Memenuhi (BM)	Tidak Memenuhi (TM)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana/target kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2020. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Hasil penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara matematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

3.1 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan hasil perbandingan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang disajikan dalam bentuk persentase. Target capaian kinerja merupakan satuan yang dijadikan target dari Indikator Kinerja (IK). Sementara itu, Indikator Kinerja (IK) merupakan ukuran untuk menggambarkan tujuan utama dari Sasaran Strategis (SS) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Stakeholder Perspective					
SS.1	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Nasional	Nilai Devisa Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	USD 3 Milyar	USD 86,4 Milyar	100% (MK)
		% Kontribusi PDB Pariwisata	3%	2.55%	83% (MK)
SS.2	Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional Sesuai Target	Jumlah Tata kelola Destinasi Pariwisata	5 Destinasi	5 Destinasi	100% (MK)
SS.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang Terdidik dan Terlatih	50.000 Orang	505.677 Orang	100% (MK)
Costumer Perspective					
SS.4	Terwujudnya Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah tata Kelola Pariwisata	5 Tata Kelola	5 Tata Kelola	100% (MK)



SS.5	Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pusat unggulan Ekonomi Kreatif	4 Lokasi	6 Lokasi	100 % (MK)
SS.6	Tingkat Ketersediaan Permodalan Industri Pariwisata dan Industri Kreatif	Nilai Penanaman Modal Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 17 Triliun	Rp. 31,07 Trilyun	120% (MLK)
SS.7	Terwujudnya Perlindungan dan Nilai Keekonomian atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk/Jasa yang Difasilitasi Mendaftar Kekayaan Intelektual	75 Produk/Jasa	1250 Produk/Jasa	100% (MK)
SS.8	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000 Orang	505.677 Orang	100% (MK)
Internal Business Perspective					
SS.9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	% Rancangan Kebijakan yang Diterbitkan	50%	100%	100% (MK)
		% Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Dilaksanakan	50%	100%	100% (MK)
Learning and Growth Perspective					
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentasi SDM Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Sesuai Kompetensi	60%	97%	100% (MK)
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60	64,51	100% (MK)
		Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50	91,25	100% (MK)
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60	88,7	100% (MK)



3.1.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Nasional

Sasaran strategis meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional terdiri dari 2 Indikator Kerja Utama yaitu Nilai Devisa Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Persentase kontribusi PDB Pariwisata. Menurut data dari Kementerian Perdagangan, di masa pandemi kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif telah menyumbang 86,4 miliar USD.

Adaptasi di masa pandemi seperti ini merupakan kunci agar sektor ini tetap bisa berjalan, dengan cara penerapan penggunaan protokol CHSE di setiap destinasi wisata. CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada *cleanliness, health, safety dan environment sustainability*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai lembaga yang menaungi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai tanggung jawab agar sektor ini tetap berjalan walaupun di masa pandemi seperti ini, dan menghadirkan program protokol ini sebagai upaya untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat melalui protokol Kesehatan yang disiplin.

Program ini akan dilaksanakan dengan pemberian sertifikasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini akan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan, hingga meningkatkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing. Selain itu, wisatawan dan masyarakat pun dapat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan CHSE.

Data Produk Domestik Bruto (PDB) yang sudah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Berita Resmi Statistik nomor 85/11/Th. XXIII tanggal 5 November 2020 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 hanya dari lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum saja mampu memberikan kontribusi sebesar 2,55 % dari total PDB nasional per triwulan 3 tahun 2020. Nilai sebenarnya kontribusi untuk setahun penuh bisa bertambah mengingat data hanya sampai triwulan 3 saja dan dari 1 lapangan usaha saja. Komposisi PDB pariwisata masih terdapat di lapangan usaha lainnya misalnya Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Lainnya namun tidak ditampilkan rincian per lapangan usaha tersebut.

**Gambar 4. Struktur PDB Menurut Usaha (Persen)**

Lapangan Usaha	2019		2020	
	Triw II	Triw III	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,57	13,45	15,46	14,68
B. Pertambangan dan Penggalian	7,39	6,95	6,28	6,16
C. Industri Pengolahan	19,52	19,62	19,86	19,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,13	1,16	1,14	1,18
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,08	0,07
F. Konstruksi	10,37	10,60	10,56	10,60
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,95	12,98	12,84	12,83
H. Transportasi dan Pergudangan	5,57	5,54	3,58	4,40
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,74	2,73	2,28	2,49
J. Informasi dan Komunikasi	3,89	3,95	4,66	4,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,10	4,18	4,44	4,32
L. Real Estat	2,75	2,73	3,06	2,93
M,N. Jasa Perusahaan	1,89	1,91	1,83	1,87
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,71	3,42	3,80	3,69
P. Jasa Pendidikan	3,22	3,28	3,54	3,57
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,09	1,23	1,36
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,92	1,95	1,86	1,94
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	95,88	95,61	96,50	96,51
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	4,12	4,39	3,50	3,49
Produk Domestik Bruto (PDB)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut data BPS bahwa Secara kumulatif, Januari. Juni 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia mencapai 3,09 juta kunjungan atau turun 59,96 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 7,72 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisman ini terdiri atas wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 1,60 juta kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 746,02 ribu kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 741,33 ribu kunjungan. Lalu pada tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Juni 2020 mencapai rata-rata 19,70 persen atau turun 32,57 poin dibandingkan dengan TPK Juni 2019 yang tercatat sebesar 52,27 persen. Selain itu, jika dibanding TPK Mei 2020, TPK hotel klasifikasi bintang pada Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,25 poin.



Gambar 5. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Klasifikasi Bintang

Provinsi	TPK (%)			Perubahan Jun 2020 thd Jun 2019 (poin)	Perubahan Jun 2020 thd Mei 2020 (poin)
	Jun 2019	Mei 2020	Jun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	42,43	8,75	13,73	-28,70	4,98
2. Sumatera Utara	49,53	13,82	20,12	-29,41	6,30
3. Sumatera Barat	54,72	11,27	21,14	-33,58	9,87
4. Riau	45,57	21,34	26,85	-18,72	5,51
5. Jambi	36,51	15,73	25,32	-11,19	9,59
6. Sumatera Selatan	54,51	18,94	32,09	-22,42	13,15
7. Bengkulu	58,98	15,97	21,92	-37,06	5,95
8. Lampung	56,11	14,36	34,73	-21,38	20,37
9. Kepulauan Bangka Belitung	34,00	15,89	20,93	-13,07	5,04
10. Kepulauan Riau	51,18	9,91	14,45	-36,73	4,54
11. DKI Jakarta	50,51	24,32	26,47	-24,04	2,15
12. Jawa Barat	53,13	12,92	20,76	-32,37	7,84
13. Jawa Tengah	49,14	10,83	17,64	-31,50	6,81
14. DI Yogyakarta	64,31	6,13	15,50	-48,81	9,37
15. Jawa Timur	57,73	16,06	22,87	-34,86	6,81
16. Banten	45,00	18,57	24,17	-20,83	5,60
17. Bali	60,37	2,07	2,07	-58,30	0,00
18. Nusa Tenggara Barat	37,34	14,42	18,59	-18,75	4,17
19. Nusa Tenggara Timur	51,40	11,57	19,69	-31,71	8,12
20. Kalimantan Barat	48,52	12,46	20,84	-27,68	8,38
21. Kalimantan Tengah	46,84	13,75	21,07	-25,77	7,32
22. Kalimantan Selatan	45,14	16,85	23,92	-21,22	7,07
23. Kalimantan Timur	52,98	26,31	34,62	-18,36	8,31
24. Kalimantan Utara	44,78	27,02	19,80	-24,98	-7,22
25. Sulawesi Utara	60,48	19,14	24,62	-35,86	5,48
26. Sulawesi Tengah	36,81	9,49	19,07	-17,74	9,58
27. Sulawesi Selatan	43,33	26,28	18,98	-24,35	-7,30
28. Sulawesi Tenggara	32,93	12,76	19,07	-13,86	6,31
29. Gorontalo	39,84	6,14	10,24	-29,60	4,10
30. Sulawesi Barat	43,23	11,25	23,31	-19,92	12,06
31. Maluku	30,19	20,95	38,75	8,56	17,80
32. Maluku Utara	37,57	9,77	17,02	-20,55	7,25
33. Papua Barat	39,51	10,73	14,53	-24,98	3,80
34. Papua	38,73	19,56	27,09	-11,64	7,53
INDONESIA	52,27	14,45	19,70	-32,57	5,25

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.1.2 Sasaran Strategis Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional Sesuai Target

Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional sesuai target mempunyai Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Tata Kelola Destinasi Pariwisata. Untuk target dalam capaian kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 5 (lima), diantaranya adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, dan Likupang yang merupakan destinasi pariwisata super prioritas.

Dalam tata Kelola destinasi wisata tidak terlepas dari 3A yaitu *Amenity*, *Accessability* dan *Attraction*. 3A dibutuhkan agar terciptanya pengelolaan wisata yang optimal sesuai dengan proses pengelolaan pariwisata. Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, sedangkan Amenitas adalah fasilitas pendukung dari sebuah



destinasi wisata dan Atraksi dalam pariwisata merupakan daya tarik utama dari sebuah destinasi wisata.

Di setiap destinasi wisata dibutuhkan infrastruktur yang memadai dan setiap destinasi wisata tersebut di tahun 2020 sedang melakukan pengembangan infrastruktur. Dengan adanya infrastrktur yang memadai akan membuat destinasi wisata tersebut meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, karena memudahkan wisatawan untuk mengunjungi tempat . tempat wisata yang diinginkan.

Akomodasi, keberadaan tolilet, tempat makan dan sarana ibadah merupakan fasilitas pendukung dalam destinasi wisata yang juga harus menjawab kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi tersebut. Di dalam suatu destinasi tentunya harus mempunyai daya tarik utama, misalnya ada kegiatan diving ataupun snorkeling di wisata bahari.

Danau Toba adalah salah satu contoh destinasi wisata yang sedang dilakukan pengembangan infrastrukturnya. Hal yang dilakukan adalah akan melakukan beberapa pembangunan pelabuhan, seperti Pelabuhan Porsea di bibir pantai danau toba. Pelabuhan tersebut nantinya berfungsi sebagai pelabuhan penyebrangan.

Gambar 6. Hasil Kunjungan Tim Deputi V ke Kawasan Danau Toba



Contoh yang kedua adalah Borobudur yang sedang melakukan pengembangan jalan menuju kawasan. Rencana yang dilakukan pada tahun ini adalah pelebaran jalan di daerah kawasan Badan Otorita Borobudur (BOB) dan membuka akses jalan menuju Bandara Kulon Progo. Tidak hanya itu saja tetapi juga akan melakukan pengembangan desa wisata. Di Kawasan BOB terdapat beberapa desa yang juga dapat menjadi potensi untuk menjadi desa wisata, itu berarti dengan adanya desa wisata akan menarik wisatawan untuk melakukan kunjungan di Kawasan tersebut.

Mandalika adalah Kawasan DPSP yang akan menjadi tuan rumah untuk ajang penyelenggaraan Moto GP. Di dalam Kawasan Mandalika sendiri sedang melakukan pembangunan sirkuit Moto GP. Untuk mendukung penyelenggaraan Moto GP tidak cukup untuk melakukan



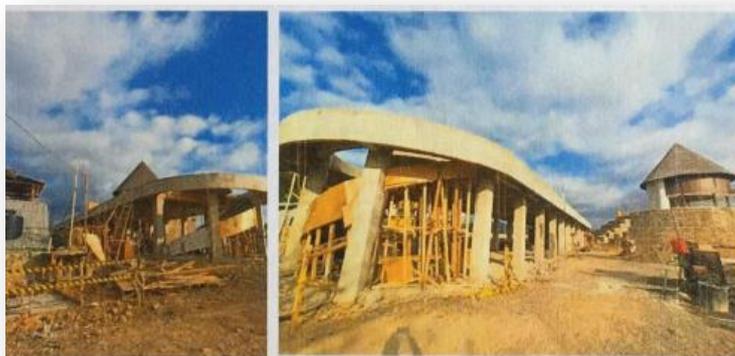
pembangunan sirkuit saja, tetapi juga dibutuhkan akomodasi, listrik, jaringan internet, fasilitas kesehatan dan juga yang sangat penting adalah infrastruktur. Sampai per oktober 2020 dilaporkan bahwa tersedia 1.000 kamar untuk Kawasan Mandalika, 6.500 kawasan kota Mataram dan 2.800 kawasan Senggigi yang artinya masih belum cukup untuk mengakomodasi jumlah wisatawan yang akan hadir.

Sebagai salah satu jawaban untuk akomodasi, saat ini dengan Kementerian PUPR sedang mengerjakan program Sarana Huni Pariwisata (Sarhunta). Program tersebut meliputi perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat yang nantinya akan menjadi homestay. Selain itu juga diusulkan fasilitas glamping untuk mendukung penyediaan akomodasi yang memadai di daerah Mandalika.

Destinasi berikutnya terletak di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Labuhan Bajo rencananya akan menjadi lokasi rangkaian penyelenggaraan KTT ASEAN dan G20 pada tahun 2021. Deputi V telah melakukan kunjungan ke lokasi tersebut guna untuk melakukan monitoring perkembangan dan pengecekan kesiapan Labuhan Bajo sebagai tuan rumah lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN dan G20.

Hasil kunjungan yang didapatkan diantaranya adalah penataan jalan seperti penggalian, pemasangan gorong-gorong dan pemindahan tiang listrik yang sudah mulai dikerjakan. Penataan Kawasan Waringin yang nantinya akan menjadi pusat souvenir, bangunan tenun, pos jaga dan ruang gourmet, dan area parkir. Progress Penataan Goa Cermin hingga Agustus 2020 telah mencapai 28% dan terdiri dari jalan dan *pedestrian*, area pengunjung wisata dan jalur trekking. Kampung wisata yang sedang ditata dengan membangun tenda-tenda *stand* makanan di sepanjang sisi dermaga.

Gambar 7. Penataan Kawasan Waringin





Gambar 8. Penataan Kampung Wisata



Kawasan terakhir dalam 5 DPSP adalah Likupang yang terletak di Sulawesi Utara. KEK Likupang juga merupakan Kawasan yang strategis di Asia . Pasifik yang juga dapat dijadikan lokasi penyelenggaraan kegiatan Internasional. Saat ini, sedang dilakukan pembangunan jalan akses dari Bandara Sam Ratulangi Manado menuju KEK Likupang sepanjang 31,55 Km dengan lebar 30 meter. Untuk mendukung amenities, rencananya akan dilakukan akomodasi dengan total kunci kamar 2.108, pusat konvensi dengan total kapasitas 1500 orang. Arena olahraga akan dibangun untuk pengembangan *sport tourism* dan melakukan perencanaan pengembangan wisata bahari.

Gambar 9. Kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus Likupang



3.1.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif

Pada sasaran ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pada pariwisata dan ekonomi kreatif dengan target capaian jumlah SDM yang terlatih adalah 50.000 orang. Berdasarkan data hasil koordinasi dengan Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2020 telah didapatkan untuk jumlah SDM yang terlatih adalah 505.677 orang



yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan. Berikut rincian program yang telah dilaksanakan :

1. Pelatihan berbasis kompetensi berjumlah 95.003;
2. Lembaga pelatihan yang terakreditasi berjumlah 112
3. Pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi berjumlah 407.427
4. Pelatihan peningkatan produktivitas berjumlah 3.135

3.1.4 Sasaran Strategis Terwujudnya Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran strategis 4 adalah Terwujudnya Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dengan capaian indikator mendapatkan 5 Tata Kelola. Realisasi pada tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditentukan. 5 tata Kelola tersebut di tahun 2020 adalah 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang diantaranya adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo dan Likupang.

Pada sasaran strategi ini sama dengan sasaran strategi 2 bahwa tata Kelola yang baik juga tidak lepas dari unsur 3A pariwisata. Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, sedangkan Amenitas adalah fasilitas pendukung dari sebuah destinasi wisata dan Atraksi dalam pariwisata merupakan daya tarik utama dari sebuah destinasi wisata. 3A dibutuhkan agar pengelolaan yang optimal.

Implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan telah dilakukan di semua daerah 5 DPSP, salah satu contoh yang bisa diambil adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan tersebut sangat dibutuhkan di daerah DPSP guna mempermudah akses wisatawan untuk mengunjungi tempat . tempat yang dikunjungi. Pelebaran jalan, pembangunan jalan, pembangunan bandara, optimalisasi penggunaan bandara, dan pembangunan pelabuhan merupakan kegiatan yang sedang dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di lima DPSP.

Gambar 10. Hasil Kunjungan Lapangan ke Tana Mori



Pembangunan sarana maupun akomodasi penting dilakukan di daerah 5 DPSP, karena merupakan kunci untuk mendukung kebutuhan



wisatawan selama berkunjung di destinasi tersebut. Destinasi Wisata Mandalika juga melakukan pembangunan akomodasi untuk meningkatkan jumlah akomodasi yang rencananya destinasi tersebut akan diselenggarakan MotoGP. Danau Toba juga sedang melakukan pengerjaan untuk pembangunan toilet di dalam kawasan agar terpenuhinya kebutuhan MCK wisatawan.

Rencana pada destinasi Likupang akan mengembangkan wisata bahari berupa pembangunan *marina club* dan *sailing club*. Diharapkan pada pembangunan fasilitas *marina* dan *sailing* akan dapat menciptakan kegiatan tahunan yang dapat mendatangkan para pelayar dan *yachter* mancanegara. Rencana tersebut mendukung dalam unsur atraksi agar menarik wisatawan untuk mengunjungi Likupang.

3.1.5 Sasaran Strategis Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif

Terwujudnya pusat unggulan Ekonomi Kreatif, diwujudkan dalam pembangunan creative hub di masing . masing DPSP. Pada tahun 2020, mendapatkan capaian realisasi sebanyak 6 tempat yang artinya sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. 6 tempat tersebut terletak yaitu Danau Toba, Semarang, Mandalika, Labuhan Bajo dan Likupang.

Pada 15 Juli 2020, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan rapat koordinasi terkait dengan pembangunan dan pengembangan *creative hub* di lima DPSP dan mendapatkan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Pengembangan *creative hub* di Samosir, masih tahap proses penandatanganan dokumen legalitas. Konsultan perencana akan ditunjuk untuk pembuatan design pada *creative hub* dan akan menyusun DED, RAB serta RKS. Bappeda Samosir juga menawarkan alternatif pilihan lokasi lain yang sudah *clear* dan *clean*, dan Badan Otorita Daerah Toba juga menawarkan lokasi alternatif *creative hub* di Parapat dan Sibisa;
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang telah menyepakati lokasi untuk *creative hub* di Galeri Industri Kreatif dan menyiapkan alternatif lain di Kawasan Kota Semarang untuk mengantisipasi jika ruang galeri yang disepakati kurang memadai;
3. pelaksanaan *creative hub* di Labuhan Bajo sampai pekerjaan struktur. Dokumen DED, RAB, dan RKS untuk pekerjaan interior bangunan sedang dalam proses penyelesaian oleh konsultan arsitek;
4. rencana pembangunan *creative hub* di Manado dan Mandalika masih dalam proses koordinasi dengan calon penerima atau pengelola dan K/L terkait penentuan lokasi creative hub;
5. PT ITDC memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan creative hub di Mandalika dengan infrastruktur (jalan, akses, air, dan listrik) yang sudah tersedia. Selain itu konsep pembangunan juga



sudah ada dengan tema Pasar Seni yang bersifat sebagai wadah atau sarana komunitas seni; dan

6. Sekretaris Daerah Manado sedang membahas penentuan lokasi pembangunan *creative hub* di Manado. Ada dua lokasi yang di tahapan diskusi yaitu *Souvenir Shop* yang terletak di Teluk Manado dan PT MRDP memiliki konsep untuk pengembangan *creative hub* di Likupang.

3.1.6 Sasaran Strategis Tingkat Ketersediaan Permodalan Industri Pariwisata dan Industri Kreatif

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah ketersediaan permodalan, dalam hal ini investasi atau penanaman modal dalam sektor parekraf. Dalam penghitungan nilai penanaman modal sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menggunakan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang di rilis setiap triwulan. Adapun sektor yang menjadi dasar perhitungan adalah mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI). Dalam data yang dirilis BKPM terdapat 23 sektor. Sementara untuk menghitung nilai dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terdiri dari sektor: hotel dan restoran, industri tekstil, dan industri barang dari kulit dan las kaki. Penanaman modal yang dihitung adalah baik penanaman modal dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pada Perjanjian Kinerja yang telah disusun, target nilai penanaman modal pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 17 triliun. Sehingga berdasarkan realisasi yang mencapai nilai Rp 31,069 triliun (tabel 1), maka capaian IK ini adalah 182,76%. Namun karena untuk mendapatkan realisasi capaian yang seimbang antar indikator kinerja, serta agar dalam penyusunan target lebih optimis dan realistis, maka dilakukan penilaian bahwa capaian tertinggi adalah 120% berapapun capaian riil yang dihasilkan.

Tabel 7. Realisasi Penanaman Modal Pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Sektor	PMA			PMDN		TOTAL
		Jumlah Proyek	Nilai (US\$ Juta)	Nilai (Rp Miliar)	Proyek	Nilai (Rp Miliar)	Nilai (Rp Miliar)
1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2011	7.622	114.333	1.411	6.670	121.003
2	Listrik, Gas dan Air	1512	6.092	91.382	1.923	33.864	125.245
3	Pertambangan	1799	3.392	50.883	1.695	16.000	66.883
4	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2.835	3.005	45.077	4.042	43.473	88.549
5	Industri Kimia Dan Farmasi	3.721	2.600	39.002	2.197	16.558	55.560
6	Transportasi, Gudang dan	1.774	2.456	36.839	3.477	96.623	133.461



No.	Sektor	PMA		Nilai (Rp Miliar)	PMDN		TOTAL
		Jumlah Proyek	Nilai (US\$ Juta)		Proyek	Nilai (Rp Miliar)	Nilai (Rp Miliar)
	Telekomunikasi						
7	Industri Makanan	4.391	1.709	25.635	5.820	34.226	59.861
8	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	4.449	1.268	19.014	516	3.831	22.845
9	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	3.606	1.137	17.058	783	1.065	18.123
10	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2.464	879	13.181	2.922	34.723	47.904
11	Industri Mineral Non Logam	3.250	769	11.540	764	6.118	17.658
12	Jasa Lainnya	9.170	885	13.269	7.317	16.263	29.532
13	Hotel dan Restoran	5.163	569	8.541	4.701	11.524	20.065
14	Industri Lainnya	1.571	484	7.253	1.068	2.434	9.686
15	Perdagangan dan Reparasi	9.494	437	6.561	27.316	16.537	23.098
16	Industri Tekstil	2.256	368	5.516	1.302	1.612	7.127
17	Industri Kayu	3.325	274	4.107	822	1.229	5.336
18	Industri Kertas dan Percetakan	840	308	4.619	1.375	5.530	10.149
19	Industri Karet dan Plastik	2.566	287	4.301	1.374	4.090	8.390
20	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	722	238	3.566	185	311	3.876
21	Konstruksi	611	113	1.701	5.344	57.054	58.755
22	Kehutanan	442	58	876	276	1.238	2.114
23	Perikanan	644	45	681	326	566	1.247
Total		68.616	34.995	524.930	76.956	411.538	936.467

Sumber data: <https://www2.bkpm.go.id/id/statistik/>

3.1.7 Sasaran Strategis Terwujudnya Perlindungan dan Nilai Keekonomian atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran ini bermaksud untuk mencapai indikator kinerja utama yaitu untuk mengetahui jumlah produk/jasa yang difasilitasi mendaftarkan kekayaan intelektual. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah 75 Produk/Jasa yang difasilitasi mendaftarkan Kekayaan Intelektual, dan realisasi yang didapatkan adalah 1250 Produk/Jasa. Realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan dan produk/jasa tersebut semua telah terfasilitasi kekayaan intelektualnya.

Beberapa hal yang telah dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi kreatif melalui Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2020 untuk mendukung pencapaian kinerja adalah pendampingan fasilitas pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk kopi arabika toba, kopi arabika minahasa, dan kopi arabika dieng banjarnegara. Pendampingan fasilitas



yang dilakukan berupa *Focus Group Discussion* (FGD), Pendampingan Sosialisasi dan Pendampingan fasilitasi pendaftaran IG. IG perlu di lindungi supaya tidak punah untuk meningkatkan nilai tambah dan menjadikan *the best* produk sehingga bisa menjadi kekuatan dalam pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui bentuk komersialisasi produk IG.

Gambar 11. Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Kopi Arabika Toba



Selain itu juga melakukan percepatan pendaftaran IG Kekayaan Intelektual di lima DPSP, dengan cara melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen Kekayaan Intelektual, Pendampingan pemeriksaan substansif IG Kopi Arabika Tapanuli Utara, dan Diskusi Hak Kekayaan Intelektual Bersama Staff Ahli Bidang Sosio . Antropolo Kemenko Marves.

Kegiatan rapat dengan Dirjen Kekayaan Intelektual membahas menindaklanjuti hasil audiensi Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) di Tapanuli Utara guna mendukung percepatan pendaftaran IG. Sedangkan Diskusi Hak KI mempunyai tujuan bertujuan untuk menindaklanjuti penyampaian risalah kebijakan pengelolaan pengetahuan/kearifan lokal sebagai kekayaan intelektual komunal (KIK) dalam mendukung sektor parekraf.

Gambar 12. Rapat Koordinasi Percepatan dengan Dirjen Kekayaan Intelektual KemenkumHAM





Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan bahwa pada RPJMN 2020-2024 tercantum target sasaran nilai tambah ekonomi kreatif. Dalam dukungan KI terhadap peningkatan nilai tambah tersebut, dapat melalui 2 cara yaitu:

- a) Hak KI individu: pendampingan hak KI kepada UMKM, kaitannya dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia (#GernasBBI).
- b) Hak KI Komunal: berkoordinasi dan bersinergi dengan K/L terkait untuk penentuan lokasi percontohan (showcase) sebagai model penguatan ekosistem dan kelembagaan hak kekayaan intelektual komunal.

3.1.8 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada sasaran ini adalah meningkatnya kualitas SDM pada pariwisata dan ekonomi kreatif dengan target capaian jumlah SDM yang terlatih adalah 50.000 orang dan sasaran ini hampir sama dengan sasaran strategis 3. Berdasarkan data hasil koordinasi dengan Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2020 telah didapatkan untuk jumlah SDM yang terlatih adalah 505.677 orang. Capaian ini menunjukkan telah melebihi target yang ditetapkan. Berikut rincian program yang telah dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Pelatihan berbasis kompetensi berjumlah 95.003;
2. Lembaga pelatihan yang terakreditasi berjumlah 112
3. Pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi berjumlah 407.427
4. Pelatihan peningkatan produktivitas berjumlah 3.135

3.1.9 Sasaran Strategis Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien.

Pada sasaran strategis ini memiliki 2 indikator yaitu, persentase rancangan kebijakan yang diterbitkan dan rancangan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan. Pada tabel Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2 indikator ini memiliki target capaian yang sama yaitu 50%. Untuk realisasi capaian pada presentase rancangan kebijakan yang diterbitkan dan rancangan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase rancangan kebijakan yang diterbitkan dan rancangan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan sudah melampaui target capaian.

Jumlah dari rancangan kebijakan yang diterbitkan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif adalah 8 rancangan kebijakan, yaitu ;

1. Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia;



2. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Faviravir dan Remdesivir;
3. Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tentang Pedomana Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional;
5. Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
6. Rancangan Nota Kesepahaman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan PT. Mastercard Indonesia tentang Penyediaan Data dan Informasi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Barang Kena Pajak yang Terdorong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Pejualan Atas Barang Mewah; dan
8. Rancangan Buku Protokol Keamanan dan Keselamatan 5 Destinasi Super Prioritas.

Sementara itu, jumlah dari rancangan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif adalah 4 rancangan rekomendasi kebijakan, yaitu ;

1. Surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Nomor B/HK.02.01/152/M-K/2020 tanggal 10 Desember 2020 Perihal Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Keputusan Presiden tentang Tim Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesian;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disele 2019 (Covid 19);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Barang Kena Pajak yang Terdorong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Pejualan Atas Barang Mewah;



3.1.10 Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten diperlukan dalam suatu organisasi agar dapat mampu melaksanakan tugas jabatannya. Untuk mengetahui SDM yang kompeten di lingkup Deputy V, telah dilakukan penilaian standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara (ASN). Standar yang dinilai meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Pengukuran kompetensi tersebut sudah mengikuti Peraturan Menteri PAN RB No 38 Tahun 2017.

Dalam penilaian SDM Kompetensi Manajerial meliputi dari integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, dan mengelola perubahan keputusan dan pengambil keputusan. Sedangkan SDM Kompetensi Sosio Kultural hanya meliputi perekat bangsa saja.

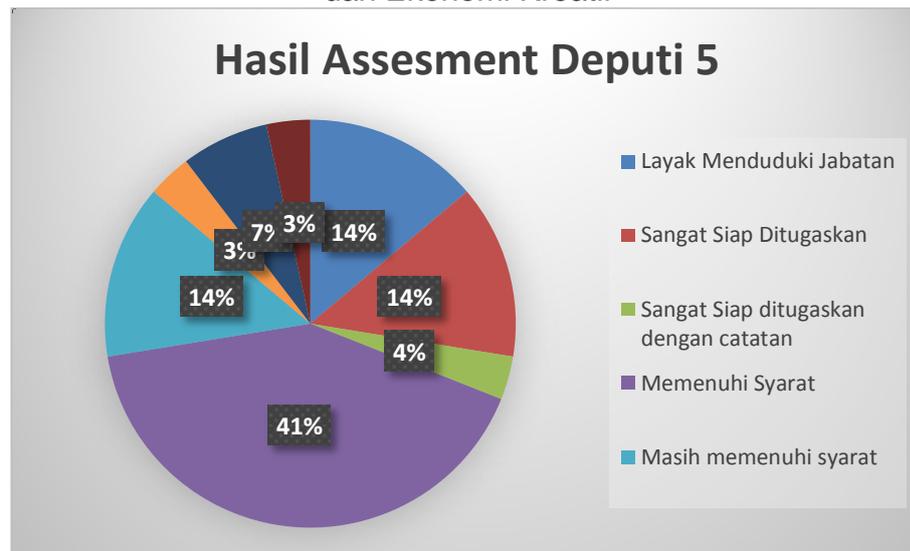
Berdasarkan rekapitulasi dari hasil assessment yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian dari 29 (dua puluh Sembilan) pegawai di Deputy V mendapatkan nilai pada layak menduduki jabatan sebanyak 4 (empat), sangat siap ditugaskan sebanyak 4 (empat), sangat siap ditugaskan dengan catatan sebanyak 1 (satu), memenuhi syarat 12 (dua belas), masih memenuhi syarat sebanyak 4 (empat), potensial sebanyak 1 (satu), cukup potensial sebanyak 2 (dua) dan belum layak menduduki jabatan sebanyak 1 (satu). Nilai assessment dan jumlah pegawai dapat dilihat di tabel yang sudah disediakan beserta grafiknya.

Tabel 8. Nilai Assesment Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Nilai Assesment	Jumlah Pegawai
1	Layak Menduduki Jabatan	4
2	Sangat Siap Ditugaskan	4
3	Sangat Siap Ditugaskan Dengan Catatan	1
4	Memenuhi Syarat	12
5	Masih Memenuhi Syarat	4
6	Potensial	1
7	Cukup Potensial	2
Total		29



Grafik 2. Hasil Assesment Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



3.1.11 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Reformasi birokrasi yang efektif hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut tentunya dilakukan di dalam program yang berada di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama di Deputy V, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Deputy dan Nilai PMPRB Deputy.

a. Nilai Evaluasi SAKIP Deputy

SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai Evaluasi SAKIP di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didapatkan dari penilaian lembar kerja evaluasi (LKE) PMPRB yaitu sebesar 91,25%.

Dalam LKE terdapat penilaian 8 area perubahan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

**Gambar 13.** Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Penilaian yang didapatkan adalah cukup baik untuk unit kerja yang baru terbentuk di tahun 2020, karena dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat memberikan dan memenuhi untuk 8 (delapan) area perubahan reformasi tersebut.

b. Nilai PMPRB Deputi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau disingkat PMPRB merupakan penilaian yang dilaksanakan oleh unit kerja dengan terpenuhinya dokumen reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi tersebut yang telah dijelaskan dalam point a yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Deputi.

Pada Nota Dinas No.251/MARVES/SESMENKO/ND/2020 menjelaskan bahwa untuk pengisian PMPRB agar segera menugaskan operator dan para asesor untuk mengerjakan pengisian secara online. Di dalam nota dinas tersebut terdapat lampiran untuk nama yang ditunjuk sebagai operator dan para asesor. Berikut adalah nama operator dan para asesor di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 9. Nama Operator dan Para Asesor

No	Nama	NIP	Jabatan	Fungsi
1	Kosmas Harefa	19671217199303 1002	Sekertris Deputi	Penanggung Jawab
2	F. Pudiarto	19690304199603 1001	Kepala Bagian Administrasi Umum	Asesor
3	Fauzi Akbar	19800920200501 1001	Kepala Bagian	Asesor



			Program	
4	Henni Jumiyanti	19790907200912 2001	Kepala Bagian Sub Tata Usaha	Aessor
5	Ambar Puji Cahyaningsih	19950114201901 2001	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Operator

Penilaian PMPRB di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah dilaksanakan sesuai arahan dari Sekretaris Semenako dan didapatkan nilai sangat memuaskan yaitu nilai 19,78 atau 91,2%. Namun dari pencapaian tersebut nilai yang didapatkan masih jauh dari target capaian kinerja tahun 2020 yaitu 50.

3.1.12 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel adalah salah satu target sasaran capaian di Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian target yang dicapai adalah 60. Target sasaran ini dapat dilihat dari penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau disingkat IKPA.

Penilaian IKPA terdiri dari Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan. Dalam hal ini Deputy Bidang koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan nilai sebesar 88,70 yang berarti sudah sangat memuaskan.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan penyajian informasi tentang alokasi anggaran yang telah ditetapkan dan besaran nilai serta besaran persen yang telah dilakukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus didukung oleh penganggaran yang memadai dan sampai dengan bulan Desember 2020 realisasi anggaran yang didapatkan sebesar Rp 7,735,232,594 dengan nilai presentase 99,20%.

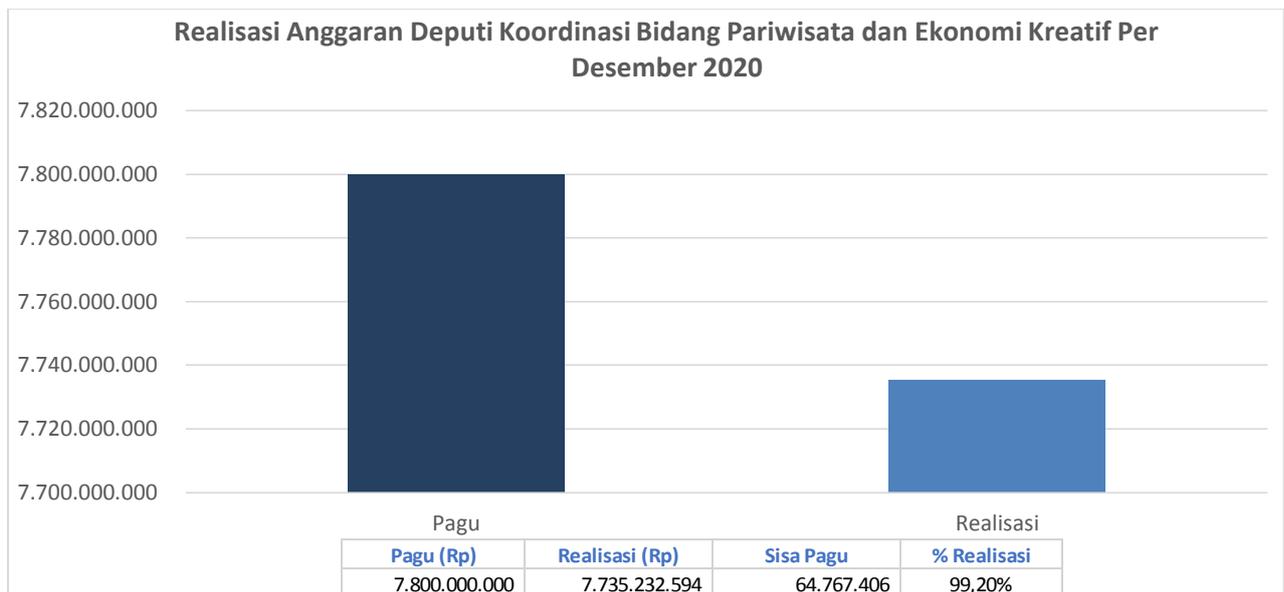
Tabel 10. Realisasi Anggaran Esselon II Deputy Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Per Desember 2020

Esselon II	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Sekretariat Deputy Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.600.000.000	2.567.006.622	98,73%



Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Asdep I)	1.640.000.000	1.639.310.566	99,96%
Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Asdep II)	890.000.000	884.896.983	99,43%
Asisten Deputi Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Asdep III)	890.000.000	884.869.276	99,42%
Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Asdep IV)	890.000.000	874.541.799	98,26%
Asisten Deputi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Asdep IV)	890.000.000	884.607.348	99,39%
Jumlah	7.800.000.000	7.735.232.594	99,20%

Grafik 3. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



3.2.1 Realisasi Anggaran Sekretariat Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Realisasi anggaran di Sekretariat Deputi didapatkan sebesar Rp 2,567,006,622 atau dengan nilai persentase 98,93% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar RP 2,600,000,000. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.

**Tabel 11.** Anggaran Sekretariat Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Akun	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
6007.001.001	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	159.544.000	158.202.640	99,16%
6006.001.002	Ketatausahaan dan Pelaporan Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.440.456.000	2.408.803.982	98,70%
Jumlah		2.600.000.000	2.567.006.622	98,93%

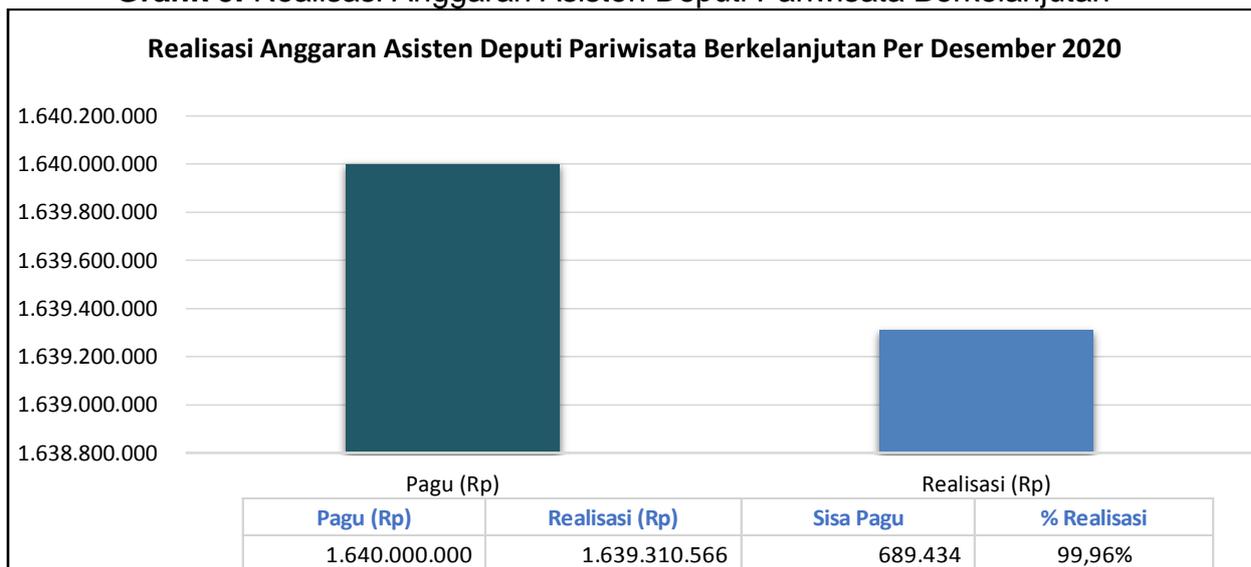
Grafik 4. Realisasi Anggaran Sekretariat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.2.2 Realisasi Anggaran Asisten Deputy Pariwisata Berkelanjutan

Realisasi anggaran di Asisten Deputy Pariwisata Berkelanjutan didapatkan sebesar Rp 1.639.310.566 atau dengan nilai persentase 99,96% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar RP 1.640.000.000. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.

Tabel 12. Anggaran Asisten Deputy Bidang Pariwisata Berkelanjutan

Kode Akun	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
6002.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	505.959.000	505.806.295	99,97%
6002.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Inovasi Produk Pariwisata Berkelanjutan	599.016.000	598.563.575	99,92%
6002.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pemasaran dan Riset Pariwisata	535.025.000	534.940.696	99,98%
Jumlah		1.640.000.000	1.639.310.566	99,96%

**Grafik 5. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pariwisata Berkelanjutan**

3.2.3 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Realisasi anggaran di Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif didapatkan sebesar Rp 884.896.983 atau dengan nilai persentase 99,01% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar RP 890.000.000. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.

Tabel 13. Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kode Akun	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
6003.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif	261.855.000	261.429.949	99,84%
6003.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Inovasi Pengembangan Produk	496.157.000	494.825.735	99,73%
6003.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pemasaran dan Riset Ekonomi Kreatif	131.988.000	128.641.299	97,46%
Jumlah		890.000.000	884.896.983	99,01%

**Grafik 6.** Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

3.2.4 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

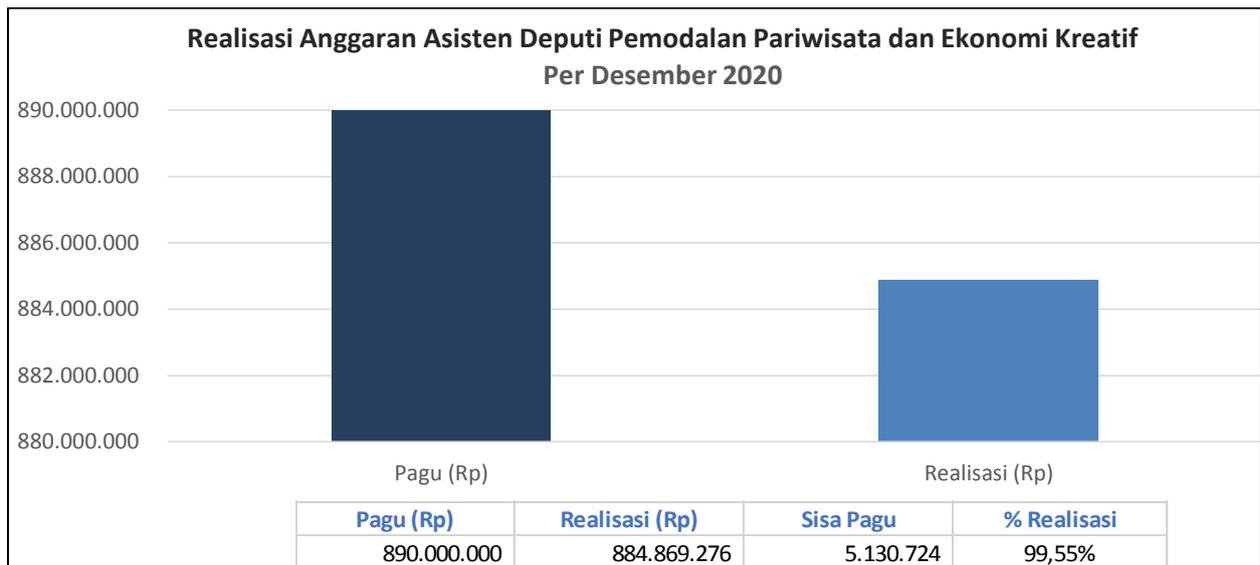
Realisasi anggaran di Asisten Deputi Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didapatkan sebesar Rp 884.869.276 atau dengan nilai persentase 99,55% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar RP 890.000.000. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.

Tabel 14. Anggaran Asisten Deputi Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Akun	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
6004.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengembangan Akses Permodalan	473.939.000	469.160.435	98,99%
6004.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Keuangan Berkelanjutan	50.845.000	50.700.000	99,71%
6004.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Analisis Pasar Permodalan	365.216.000	365.008.841	99,94%
Jumlah		890.000.000	884.869.276	99,55%



Grafik 7. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pemodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



3.2.5 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Realisasi anggaran di Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didapatkan sebesar Rp 874.541.799 atau dengan nilai persentase 98,02% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar RP 890.000.000. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.

Tabel 15. Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kode Akun	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
6005.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Informasi Kekayaan	156.163.000	156.120.670	99,97%
6005.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Penyelesaian Sengketa Kekayaan	526.014.000	520.876.720	99,02%
6005.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengembangan Kekayaan Intelektual	207.823.000	197.544.409	95,05%
Jumlah		890.000.000	874.541.799	98,02%



Grafik 8. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



3.2.6 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

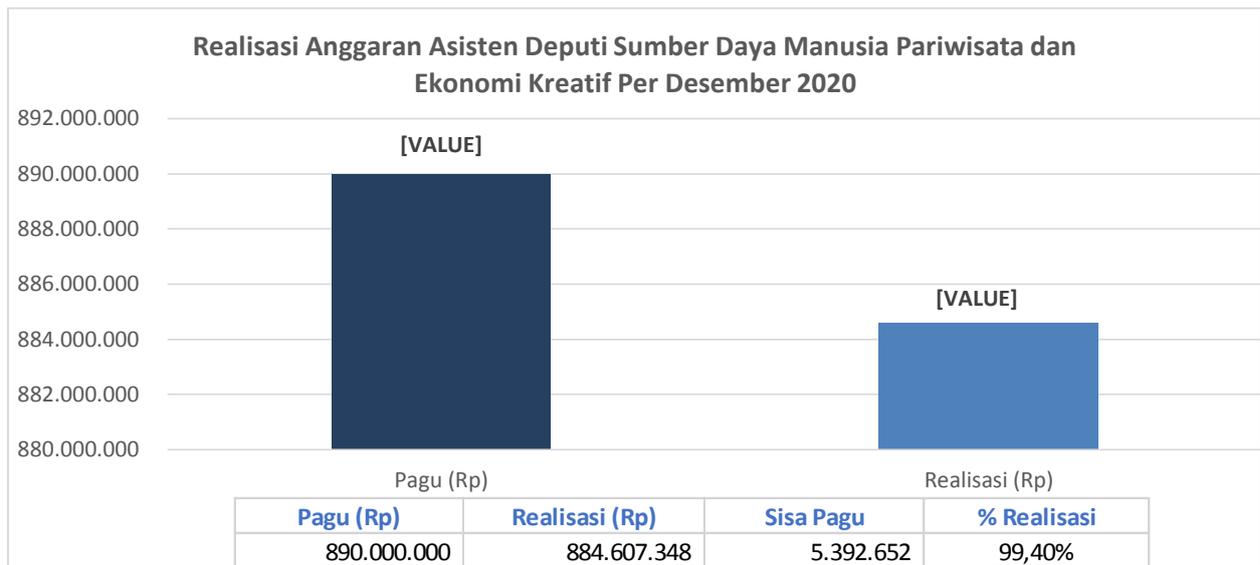
Realisasi anggaran di Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didapatkan sebesar Rp 884.607.348 atau dengan nilai persentase 99,40% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar RP 890.000.000. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.

Tabel 16. Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kode Akun	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
6006.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan, Riset Pariwisata dan Ekonomi	299.241.000	296.510.612	99,09%
6006.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pelatihan dan Sertifikasi	295.506.000	293.551.031	99,34%
6006.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Hubungan Antar Lembaga	295.253.000	294.545.705	99,76%
Jumlah	-	890.000.000	884.607.348	99,40%



Grafik 9. Anggaran Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif





BAB IV PENUTUP

Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah, selama tahun 2020 nilai capaian kinerja unit Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **100,2%**. Nilai tersebut didapat melalui akumulasi nilai tiap perspektif yang ada. Adapun penjelasan singkat mengenai pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Capaian Kinerja Unit Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Stakeholder Perspective					
SS.1	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Nasional	Nilai Devisa Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	USD 3 Milyar	USD 86,4 Milyar	100% (MK)*
		% Kontribusi PDB Pariwisata	3%	2.55%	83% (MK)**
SS.2	Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional Sesuai Target	Jumlah Tata kelola Destinasi Pariwisata	5 Destinasi	5 Destinasi	100% (MK)
SS.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang Terdidik dan Terlatih	50.000 Orang	505.677 Orang	100% (MK)
Costumer Perspective					
SS.4	Terwujudnya Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah tata Kelola Pariwisata	5 Tata Kelola	5 Tata Kelola	100% (MK)
SS.5	Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pusat unggulan Ekonomi Kreatif	4 Lokasi	6 Lokasi	100 % (MK)
SS.6	Tingkat Ketersediaan Permodalan Industri Pariwisata dan Industri Kreatif	Nilai Penanaman Modal Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 17 Triliun	Rp. 31,07 Trilyun	120% (MK)
SS.7	Terwujudnya Perlindungan dan Nilai Keekonomian atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk/Jasa yang Difasilitasi Mendaftar Kekayaan Intelektual	75 Produk/Jasa	1250 Produk/Jasa	100% (MK)
SS.8	Menigkatnya Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000 Orang	505.677 Orang	100% (MK)
Internal Business Perspective					



SS.9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	% Rancangan Kebijakan yang Diterbitkan	50%	100%	100% (MK)
		% Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Dilaksanakan	50%	100%	100% (MK)
Learning and Growth Perspective					
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentasi SDM Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Sesuai Kompetensi	60%	97%	100% (MK)
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60	64,51	100% (MK)
		Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50	91,25	100% (MK)
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60	88,7	100% (MK)

*Data Kemendag untuk Kontribusi Ekonomi Kreatif Tahun 2020 Sampai Triwulan III

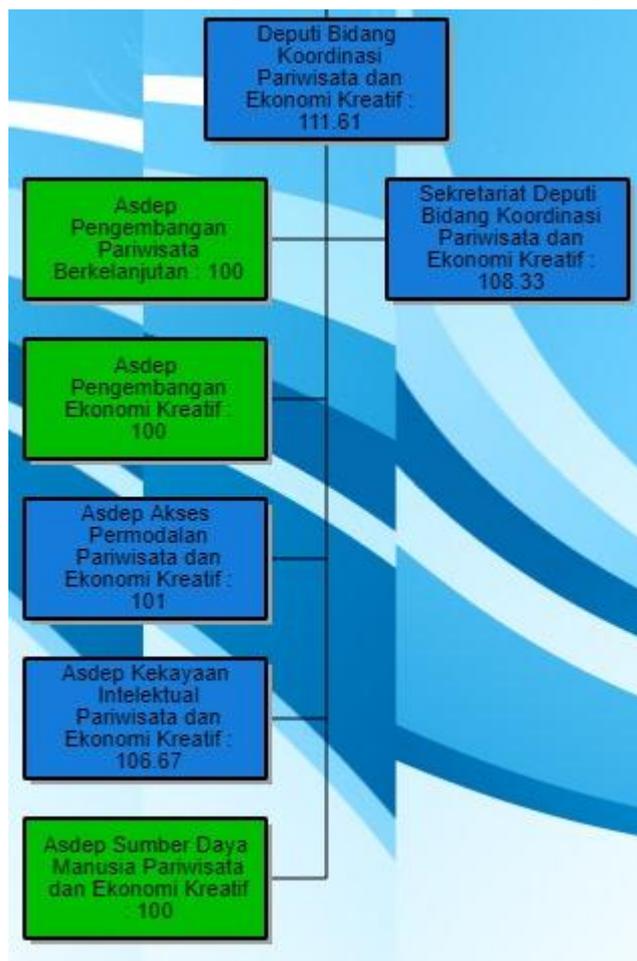
**Data BPS untuk Kontribusi PDB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sampai Triwulan III tahun 2020

*** SAKIP masih dalam proses penilaian oleh inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Matirim dan Investasi

Berdasarkan hasil dari SIK-M berbasis *Balance Scorecard*, selama tahun 2020 capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **111,61%**. Penjelasan atas capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 14. Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan SIK-M Berbasis *Balance Scorecard*



Selain itu realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Unit Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp 7,735,232,594 dengan nilai presentase 99,20%. Berikut terlampir tabel penjelasan realisasi anggaran dari masing-masing unit kerja di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Esselon II	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Sekretariat Deputy Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.600.000.000	2.567.006.622	98,73%
Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Asdep I)	1.640.000.000	1.639.310.566	99,96%



Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Asdep II)	890.000.000	884.896.983	99,43%
Asisten Deputi Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Asdep III)	890.000.000	884.869.276	99,42%
Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Asdep IV)	890.000.000	874.541.799	98,26%
Asisten Deputi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Asdep IV)	890.000.000	884.607.348	99,39%
Jumlah	7.800.000.000	7.735.232.594	99,20%



BAB V LAMPIRAN

5.1 Lampiran Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Odo R.M Manuhutu
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

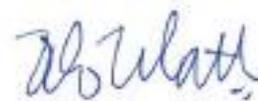
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2020

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Odo R.M Manuhutu



LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

TARGET KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Nasional	1	Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	USD 3 Miliar
		2	% Kontribusi PDB pariwisata	3 %
SS.2	Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional sesuai Target	3	Jumlah Tata Kelola Destinasi Pariwisata	5 Destinasi
SS.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	Jumlah SDM Pariwisata yang Terdidik dan Terlatih	50.000 orang
Customer Perspective				
SS.4	Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan	5	Jumlah Tata Kelola Pariwisata	5 Tata Kelola
SS.5	Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	6	Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	4 lokasi
SS.6	Tingkat ketersediaan permodalan industri pariwisata dan industri kreatif	7	Nilai penanaman modal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp 17 Triliun
SS.7	Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas Kekayaan Intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	8	Jumlah Produk / Jasa yang difasilitasi mendaftar Kekayaan Intelektual	75 Produk / Jasa
SS.8	Meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	9	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	50.000 orang
Internal Business Perspective				
SS.9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	10	% rancangan kebijakan yang diterbitkan	50%
		11	% rancangan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan	50%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12	Presentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sesuai kompetensi	60%



SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60
		14	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
Koordinasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Rp. 2.000.000.000,00
Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp. 1.250.000.000,00
Koordinasi Kelayaan Intelektual Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Rp. 1.250.000.000,00
Koordinasi Akses Permodalan Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Rp. 1.250.000.000,00
Koordinasi SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Rp. 1.250.000.000,00
Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Anggaran	Rp. 10.000.000.000,00

Jakarta, September 2020

Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi RI,

Luhut B. Pandjaitan

Deputi Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Odo R.M. Manuhutu



5.2 Lampiran Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan SIK-M berbasis *Balance Scorecard*





5.3 Lampiran Pagu dan Realisasi Anggaran Desember 2020

LAPORAN REALISASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Bulan : Desember

Kode	Uraian (register - Beban - Jnsban - CT Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota)	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	7.800.000.000	7.735.232.594	64.767.406
0002		1.640.000.000	1.639.310.868	889.434
0002.001		1.640.000.000	1.639.310.868	889.434
0002.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	605.959.000	605.806.295	152.705
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengembangan	505.959.000	505.806.295	152.705
A	Pengembangan KSPN dan DSP	505.959.000	505.806.295	152.705
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	19.195.000	19.138.500	56.500
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	12.517.000	12.500.000	17.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	13.500.000	13.500.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	110.954.000	110.944.805	9.195
524114	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	138.348.000	138.315.000	33.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	211.445.000	211.407.990	37.010
0002.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Inovasi Produk Pariwisata Berkelanjutan	699.016.000	698.063.575	452.425
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Inovasi Produk	599.016.000	598.563.575	452.425
A	Pengembangan Inovasi dan Produk Pariwisata Berkelanjutan di KSPN dan	584.586.000	584.140.630	445.370
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	52.147.000	52.144.500	2.500
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	16.173.000	16.150.000	23.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	17.600.000	17.200.000	400.000
522191	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Lainnya	51.950.000	51.947.500	2.500
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	163.271.000	163.266.545	4.455
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	283.445.000	283.432.085	12.915
B	Pengembangan Taman Bumi - Geopark Indonesia	14.430.000	14.422.945	7.055
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	2.225.000	2.222.500	2.500
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	12.205.000	12.200.445	4.555
0002.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pemasaran dan Riset Pariwisata	695.025.000	694.940.696	84.304
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemasaran dan	535.025.000	534.940.696	84.304
A	Pengembangan Strategi Pemasaran, Promosi Pariwisata, dan Riset Pariwisata	535.025.000	534.940.696	84.304
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	33.603.000	33.600.500	2.500
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	19.748.000	19.700.000	48.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	27.000.000	27.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	107.439.000	107.409.300	29.700
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	347.235.000	347.230.896	4.104
0003		890.000.000	884.896.983	5.103.017
0003.001		890.000.000	884.896.983	5.103.017
0003.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif	261.855.000	261.429.949	425.051
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Strategi	261.855.000	261.429.949	425.051
A	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Strategi Pengembangan	261.855.000	261.429.949	425.051
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	7.619.000	7.618.300	700
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	3.400.000	3.400.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	16.600.000	16.600.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	40.586.000	40.346.749	239.251
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	193.650.000	193.464.900	185.100
0003.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Inovasi Pengembangan Produk	496.157.000	494.825.735	1.331.265
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Inovasi	496.157.000	494.825.735	1.331.265
A	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	496.157.000	494.825.735	1.331.265
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	7.039.000	6.988.000	51.000
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	20.350.000	20.200.000	150.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	35.600.000	35.500.000	100.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	113.739.000	113.156.625	582.375
524114	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	50.000	0	50.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	319.379.000	318.981.110	397.890
0003.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pemasaran dan Riset Ekonomi Kreatif	131.988.000	128.641.299	3.346.701
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemasaran dan	131.988.000	128.641.299	3.346.701
A	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	131.988.000	128.641.299	3.346.701
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	1.235.000	792.000	443.000
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	8.000.000	8.000.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	5.000.000	4.100.000	900.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	46.010.000	44.153.664	1.856.336
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	71.743.000	71.595.635	147.365
0004		890.000.000	884.899.276	5.100.724
0004.001		890.000.000	884.899.276	5.100.724
0004.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengembangan Akses Permodalan	473.939.000	469.160.435	4.778.565
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengembangan	473.939.000	469.160.435	4.778.565
A	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Akses	473.939.000	469.160.435	4.778.565
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	9.950.000	9.940.000	10.000
522131	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Konsultan	50.000.000	49.875.000	125.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]



Kode	Uraian (register - Beban - Jrsban - Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota)	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	16.470.000	11.850.000	4.620.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	18.600.000	18.600.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	73.832.000	73.828.440	3.560
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	305.087.000	305.066.995	20.005
9004.001.002	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Keuangan Berkelanjutan	80.845.000	80.700.000	145.000
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Keuangan	50.845.000	50.700.000	145.000
A	<u>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Keuangan Berkelanjutan sektor usaha</u>	50.845.000	50.700.000	145.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	845.000	825.000	20.000
522131	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Konsultansi	50.000.000	49.875.000	125.000
9004.001.003	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Analisis Pasar Permodalan	365.216.000	365.008.841	207.159
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Analisis Pasar	365.216.000	365.008.841	207.159
A	<u>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Analisis Pasar Permodalan sektor</u>	365.216.000	365.008.841	207.159
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	8.525.000	8.525.000	0
522131	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Konsultansi	80.000.000	79.875.000	125.000
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	5.950.000	5.900.000	50.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	14.800.000	14.800.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.623.000	5.622.700	300
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	250.318.000	250.286.141	31.859
9006		890.000.000	874.641.799	15.468.201
9006.001		890.000.000	874.641.799	15.468.201
9006.001.001	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Informasi Kekayaan	166.163.000	166.120.670	42.330
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemberdayaan	166.163.000	166.120.670	42.330
A	<u>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemberdayaan Informasi Kekayaan</u>	166.163.000	166.120.670	42.330
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	2.690.000	2.688.000	2.000
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	3.600.000	3.600.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	8.300.000	8.300.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	97.398.000	97.397.670	330
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	44.175.000	44.135.000	40.000
9006.001.002	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Penyelesaian Sengketa Kekayaan	626.014.000	620.676.720	5.137.280
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Penyelesaian	626.014.000	620.676.720	5.137.280
A	<u>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penyelesaian Sengketa Kekayaan</u>	626.014.000	620.676.720	5.137.280
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	26.906.000	26.875.000	31.000
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	47.840.000	44.784.155	3.055.845
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	25.400.000	23.600.000	1.800.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	150.088.000	149.928.315	159.685
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	275.780.000	275.689.250	90.750
9006.001.003	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Pengembangan Kekayaan Intelektual	207.823.000	197.544.409	10.278.591
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengembangan	207.823.000	197.544.409	10.278.591
A	<u>SINKRONISASI PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</u>	207.823.000	197.544.409	10.278.591
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	108.288.000	100.017.500	8.270.500
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	91.965.000	91.965.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	430.000	0	430.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	7.140.000	5.561.909	1.578.091
9006		890.000.000	884.607.348	5.392.652
9006.001		890.000.000	884.607.348	5.392.652
9006.001.001	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan, Riset Pariwisata dan Ekonomi	299.241.000	296.610.612	2.730.388
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pendidikan,	299.241.000	296.610.612	2.730.388
A	<u>Sinkronisasi, Koordinasi, Evaluasi dan Pengendalian kebijakan bidang</u>	254.957.000	252.267.118	2.689.882
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	1.719.000	1.718.200	800
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	13.300.000	13.300.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	7.400.000	7.400.000	0
522191	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Lainnya	60.000.000	58.500.000	1.500.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	72.527.000	71.705.485	821.515
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	100.011.000	99.643.433	367.567
B	<u>Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian kebijakan bidang pendidikan,</u>	44.284.000	44.243.494	40.506
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	44.284.000	44.243.494	40.506
9006.001.002	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Pelatihan dan Sertifikasi	295.506.000	293.551.031	1.954.969
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pelatihan dan	295.506.000	293.551.031	1.954.969
A	<u>Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pelatihan</u>	295.506.000	293.551.031	1.954.969
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	1.577.000	1.574.320	2.680
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	12.800.000	12.760.000	40.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	12.200.000	11.350.000	850.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	48.359.000	48.358.985	15
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	220.570.000	219.507.726	1.062.274
9006.001.003	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Hubungan Antar Lembaga	295.253.000	294.545.705	707.295
051	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Hubungan Antar	295.253.000	294.545.705	707.295
A	<u>Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Hubungan Antar</u>	261.411.000	261.221.350	189.650
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	27.504.000	27.501.100	2.900
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	15.200.000	15.200.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	8.500.000	8.500.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	86.311.000	86.128.250	182.750

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]



Kode	Uraian (register - Beban - Jrsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota)	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	123.896.000	123.892.000	4.000
B	Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Hubungan	7.374.000	6.934.400	439.600
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	7.374.000	6.934.400	439.600
C	Rapat Evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang	26.468.000	26.389.955	78.045
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	26.468.000	26.389.955	78.045
9007		2.800.000.000	2.667.006.622	32.993.378
9007.001		2.800.000.000	2.667.006.622	32.993.378
9007.001.001	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Bidang Koordinasi Pariwisata dan	169.644.000	168.202.640	1.341.360
051	Perencanaan Program	20.331.000	19.377.000	954.000
A	Pengelolaan Rencana Kerja	14.581.000	13.844.000	737.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	1.000	0	1.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	10.500.000	9.800.000	700.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	4.080.000	4.044.000	36.000
B	Pengelolaan Perjanjian Kinerja	2.250.000	2.222.500	27.500
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	2.250.000	2.222.500	27.500
C	Pengelolaan Program Strategis	3.500.000	3.310.500	189.500
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	3.500.000	3.310.500	189.500
052	Perencanaan Anggaran	27.851.000	27.810.000	41.000
A	Pengelolaan Perjanjian Kinerja	1.000	0	1.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	1.000	0	1.000
B	Revisi RKAKL	27.850.000	27.810.000	40.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	3.900.000	3.900.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	23.950.000	23.910.000	40.000
053	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	44.891.000	44.768.340	122.660
A	Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan	43.891.000	43.808.340	82.660
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	19.250.000	19.200.000	50.000
522191	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Lainnya	1.000	0	1.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	24.640.000	24.608.340	31.660
B	Evaluasi Laporan Kinerja Tahunan	1.000.000	960.000	40.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	1.000.000	960.000	40.000
054	Dukungan Kebijakan Strategi Kedeputian	66.471.000	66.247.300	223.700
A	Pengelolaan Rencana Kerja	2.070.000	1.957.500	112.500
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	2.070.000	1.957.500	112.500
B	Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Kebijakan Strategi Kedeputian	64.401.000	64.289.800	111.200
522151	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Profesi	1.800.000	1.800.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	36.100.000	36.079.800	20.200
524114	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	12.100.000	12.050.000	50.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	14.400.000	14.360.000	40.000
524219	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.000	0	1.000
9007.001.002	Ketatausahaan dan Pelaporan Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.440.466.000	2.408.808.962	31.657.038
051	Pengelolaan Ketatausahaan	82.910.000	82.143.200	766.800
A	Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan	40.830.000	40.724.700	105.300
524114	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	10.200.000	10.200.000	0
524115	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	4.350.000	4.350.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	26.280.000	26.174.700	105.300
B	Pelayanan Ketatausahaan	42.080.000	41.418.500	661.500
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	25.000.000	24.434.500	565.500
524114	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	10.600.000	10.600.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	6.480.000	6.384.000	96.000
052	Pengelolaan Pelaporan	3.000	0	3.000
A	Penyusunan Laporan Keag Tahunan	1.000	0	1.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	1.000	0	1.000
B	Penyusunan Laporan Keag Bulanan	1.000	0	1.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	1.000	0	1.000
C	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	1.000	0	1.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	1.000	0	1.000
053	Pengelolaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	10.630.000	10.553.820	76.180
A	Pengelolaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	10.630.000	10.553.820	76.180
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	2.300.000	2.257.500	42.500
524114	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	2.050.000	2.050.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	6.280.000	6.246.320	33.680
054	Dukungan Kesekretariatan	2.346.913.000	2.316.106.962	30.806.038
A	Penyelenggaraan Koordinasi, Administrasi Umum Perkantoran dan Pelayanan	2.346.913.000	2.316.106.962	30.806.038
521131	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Barang Operasional - Penanganan	98.450.000	98.054.179	395.821
521211	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Bahan	1.449.000	1.425.000	24.000
521219	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	159.390.000	157.137.793	2.252.207
522141	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Sewa	334.804.000	333.050.000	1.754.000
522191	[00000000-A-0-0-175-01-51] Beban Jasa Lainnya	20.000.000	4.000.000	16.000.000
522192	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	172.200.000	172.100.000	100.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Biasa	60.460.000	60.431.910	28.090
524114	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	551.250.000	543.200.000	8.050.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]



Kode	Uraian (register - Beban - Jnsban - Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabikota)	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
524119	[00000000-A-0-0-175-01-51] Belanja Perjalanan Lainnya	948.910.000	946.708.080	2.201.920

= Terdapat Pengembalian Belanja (Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja)



5.4 Kertas Kerja Bahan Kebijakan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif”



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

KERTAS KERJA BAHAN KEBIJAKAN

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
SDM BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

No DIPA : SP DIPA-120.01.1.350494/2020
 No.Keg : 6006.001.003.051A.522191
 Nomor : 27/ADS/DS/MARVES/XII/2020
 Tanggal : 28 Desember 2020

C. Presentasi Target Kinerja

Berdasarkan target kinerja dari Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maka target kinerja yang difasilitasi dalam pendidikan, pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia adalah 50.000 orang. Berdasarkan hasil koordinasi fasilitasi yang dilaksanakan bersama Ditjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia telah mencapai 505.677 berarti telah melebihi target sebanyak 455.677. Berikut rincian program yang telah dilaksanakan

1. Pelatihan berbasis kompetensi berjumlah 95.003
2. Lembaga pelatihan yang terakreditasi berjumlah 112
3. Pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi berjumlah 407.427
4. Pelatihan peningkatan produktivitas berjumlah 3.135

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa capaian target kinerja sudah memenuhi target capaian 100 % dan mencapai target yang telah dilaksanakan.

Dibuat di Jakarta
 Pada tanggal, 28 Desember 2020
 Plt. Asdep Sumber Daya Manusia
 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Rustam Efendi

5.5 Ringkasan Kebijakan Sasaran Strategis “Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien”



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

**RINGKASAN KEBIJAKAN
RANCANGAN KEBIJAKAN YANG DITERBITKAN**

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No DIPA : SP DIPA – 120.01.1.350494/2020
 No.Keg :
 Nomor :
 Tanggal :



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

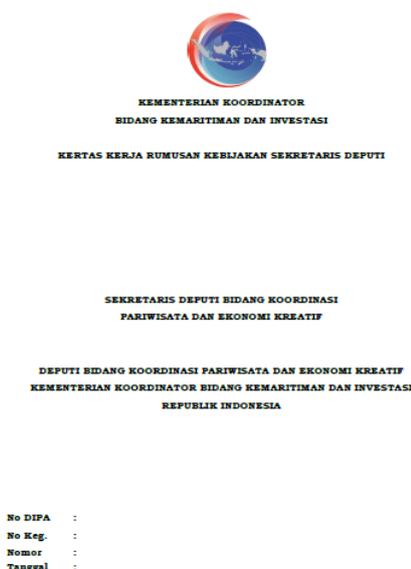
**RINGKASAN KEBIJAKAN
RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DILAKSANAKAN**

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No DIPA : SP DIPA – 120.01.1.350494/2020
 No.Keg :
 Nomor :
 Tanggal :



5.6 Kertas Kerja Kebijakan Sasaran Strategis “Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien” (IKPA)



D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nilai Akhir 88,70 sangat memuaskan.

E. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024;
4. Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025
5. Permenpan RB No 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.
6. Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 168/DV Tahun 2020 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal, Desember 2020

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rustam Efendi

5.7 Kertas Kerja Kebijakan Sasaran Strategis “Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif” (SAKIP dan PMPRB)



D. KESIMPULAN

Penilaian RMPMB di Lingkungan Deputy sudah dilaksanakan sesuai arahan dari Sekretaris Semenke bahwa Nilai sangat memuaskan dengan nilai 19,78 atau 91,2 %

F. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024;
4. Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025
5. Permenpan RB No 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Prioritas dan Quickwins Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 168/DV Tahun 2020 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal, Desember 2020

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rustam Efendi



5.8 Kertas Kerja Kebijakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.



A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal dalam keseharian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikenal tahan banting saat krisis moneter, menjadi korban paling terdampak secara ekonomi. Di tengah situasi pandemi Covid-19, terjadi penurunan penjualan produk UMKM, seperti fesyen dan elektronik.

Wadah penjualan online kini menjadi solusi karena mampu bertahan di tengah situasi pandemi ini. Namun, masih banyak unit UMKM yang belum meleak online terutama di luar kota besar. Hanya 8 juta dan 60 juta unit UMKM yang sudah terhubung dengan wadah penjualan online. Untuk itu, kini saatnya kita bergotong-royong untuk menjangkau seluruh unit UMKM. Untuk itulah Gerakan #BanggaBuatanIndonesia ini digaungkan dan diluncurkan pada 14 Mei 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan didukung penuh oleh jajaran Kementerian.

Gerakan #BanggaBuatanIndonesia bertujuan mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk go digital dan memperluas jangkauan pasar UMKM hingga ke pelosok daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan digital melalui e-katalog yang dikelola oleh LKPP dan e-commerce. Bukan semata gerakan sosial, para e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, Lazada, Golek, dan Grab yang berada dalam naungan Asosiasi E-Commerce Indonesia (AIEA), berkomitmen menyediakan edukasi dan pelatihan bagi para UMKM yang memiliki kendala untuk memulai usahanya secara online.

Gerakan ini juga mendorong konsumen untuk lebih bangga membeli dan menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan #BanggaBuatanIndonesia harapannya akan membuat Indonesia lebih cepat bangkit dari kondisi sekarang yang sedang dilanda pandemi Covid-19.

B. Deskripsi Isu

1. Sektor UMKM merupakan penyumbang devisa negara yang mampu bertahan terhadap perubahan iklim perekonomian makro, pada akhir 2020, ditargetkan kontribusi UMKM terhadap ekspor meningkat menjadi 18% dari sebelumnya 14%, begitu juga dengan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional meningkat menjadi 61% dan rasio kewirausahaan menjadi 3,55%.

2. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan omzet UMKM yang sebagian besar aktivitas penjualannya masih dilakukan secara luring (offline). Hal ini disebabkan oleh perubahan cepat perilaku konsumen dari belanja luring menjadi daring (online). Pada umumnya, UMKM menghadapi masalah kurangnya pelatihan, keterbatasan modal, minimnya akses pasar, dan kurangnya promosi. Data terkini menunjukkan penjualan UMKM non digital (offline) menurun terutama untuk kategori non esensial, seperti pakaian dan elektronik khususnya pada sub sector ekonomi kreatif fesyen, kuliner dan kriya.

3. Terdapat 60 juta UMKM yang bersiap menghadapi perubahan akibat pandemic covid 19, dimana delapan juta UMKM online yang terdaftar pada database perusahaan berbasis teknologi khususnya platform e-commerce.

4. Target pada 2020 untuk peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor menjadi 18% dari sebelumnya 14% nampaknya akan mengalami tantangan yang cukup besar. Data terkini menunjukkan penjualan produk UMKM (seperti pakaian dan

5.9 Laporan Strategi Pemasaran Bagi Pelaku UMKM



LAPORAN STRATEGI PEMASARAN BAGI PELAKU UMKM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF IKU ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, telah dilaksanakan strategi pemasaran melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk: Pertama, mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal, memperbaiki daya beli masyarakat, dan mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Kedua, memperkuat kelangsungan usaha dan pemasaran UMKM secara lebih cepat dan luas. Ketiga, menumbuhkan rasa bangga dan pro produk lokal bagi konsumen Indonesia. Keempat, mendorong national branding produk unggulan, melalui kurasi UMKM Top Brand yang bangkit dan tumbuh, sehingga menciptakan industri baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gerakan ini melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terkait untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden pada peluncuran Gemas BBI 14 Mei 2020 yakni penambahan sebesar 2 juta unit UMKM/IKM onboarding ke pasar digital/market place. Adapun data awal pada Mei 2020 terdapat 8 juta unit UMKM yang sudah terhubung ke pasar digital. Kegiatan tersebut telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Hingga 31 Desember 2020 telah tercapai 3,7 juta unit UMKM/IKM onboarding masuk ke ekosistem digital. Hal ini 70% lebih tinggi daripada target yang ditetapkan yakni sebanyak 2 juta unit UMKM/IKM. Oleh karena itu, total unit UMKM/IKM yang onboarding menjadi 11,7 juta.

Capaian tersebut berkat kerja sama erat dan inovasi yang dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha ekosistem digital, pelaku usaha, dan asosiasi. Adapun hasil yang telah dicapai yakni tersedianya 88 konten pelatihan pada situs BBI yang dapat diakses oleh pelaku UMKM/IKM, penyaluran modal melalui program Digital Kredit UMKM oleh HIMBARA sebesar 4,2 triliun Rupiah, dan partisipasi pelaku usaha kecil dalam program pengadaan secara elektronik melalui aplikasi BelaPengadaan yang dibuat oleh LKPP.